

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah sampah telah menjadi isu lingkungan global yang sangat mendesak untuk ditangani di abad ke-21. Seiring dengan peningkatan populasi dunia dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang masif, volume sampah yang dihasilkan terus meningkat secara eksponensial. Di tingkat nasional, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam manajemen limbah padat, di mana kegagalan pengelolaan sampah berdampak langsung pada pencemaran tanah, polusi udara, hingga kerusakan ekosistem perairan. Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi di tingkat daerah.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayah "Bumi Murakata", telah menetapkan instrumen hukum berupa Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini secara filosofis bertujuan untuk menjamin terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, serta memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masyarakat serta wewenang pemerintah daerah dalam mengelola sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan.

Secara teoretis, implementasi sebuah kebijakan publik seperti Perda Pengelolaan Sampah menuntut adanya keselarasan antara teks aturan dengan fakta di lapangan. Namun, pada kenyataannya, terdapat kesenjangan yang lebar

(*policy gap*) antara apa yang diamanatkan dalam regulasi dengan realita objektif yang terjadi di masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki karakteristik geografis unik. Salah satu wilayah yang mengalami kendala serius dalam implementasi kebijakan ini adalah Desa Sungai Buluh, Kecamatan Labuan Amas Utara.

Desa Sungai Buluh merupakan kawasan lahan basah yang pemukimannya berada di atas aliran sungai dan rawa. Kondisi geografis ini seharusnya menuntut standar pengelolaan sampah yang lebih ketat karena limbah domestik yang tidak terkelola akan langsung mencemari sumber daya air. Namun, berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Desa Sungai Buluh, ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa implementasi Perda No. 10 Tahun 2013 belum berjalan sebagaimana mestinya.

Adapun fenomena masalah yang ditemukan peneliti di lapangan adalah sebagai berikut:

Fenomena Masalah:

1. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat di mana warga masih terbiasa membuang sampah sembarangan, terutama langsung ke bawah rumah panggung dan aliran sungai.
2. Belum tersedianya sarana infrastruktur yang diamanatkan regulasi, di mana di Desa Sungai Buluh sama sekali tidak ada Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang memadai.
3. kurangnya Program Pembinaan Dari Pemerintah Desa Terkait Sampah.

Fenomena pertama mengenai perilaku masyarakat yang membuang sampah ke sungai merupakan pelanggaran nyata terhadap Pasal 55 huruf (d) Perda No. 10 Tahun 2013. Kebiasaan ini telah berlangsung secara turun-temurun dan diperparah dengan pandangan masyarakat yang menganggap sungai sebagai tempat pembuangan akhir yang praktis. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komunikasi dan edukasi dalam kebijakan ini gagal mengubah pola pikir masyarakat (*Sumber: Observasi Awal Peneliti, 2026*).

Fenomena kedua terkait ketiadaan TPS menunjukkan lemahnya variabel sumber daya dalam implementasi kebijakan. Pasal 9 Perda No. 10 Tahun 2013 secara eksplisit mewajibkan penyediaan sarana prasarana. Tanpa adanya TPS, masyarakat tidak memiliki pilihan logis selain membuang sampah ke media lingkungan. Ketiadaan fasilitas ini menjadi hambatan struktural yang membuat aturan larangan membuang sampah menjadi mustahil untuk dipatuhi secara penuh oleh warga desa (*Sumber: Observasi Awal Peneliti, 2026*).

Fenomena ketiga kurangnya pembinaan menunjukkan lemahnya aspek disposisi atau komitmen pelaksana di tingkat bawah. Pemerintah Desa, yang seharusnya menjadi ujung tombak pembinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5), cenderung membiarkan praktik pembuangan sampah sembarangan tanpa adanya upaya edukasi rutin maupun penegakan sanksi yang tegas. Ketidakhadiran negara di tingkat desa dalam isu lingkungan ini menyebabkan aturan hukum kehilangan taringnya (*Sumber: Observasi Awal Peneliti, 2026*).

Ketidaksinkronan ini mengindikasikan adanya kemacetan dalam proses implementasi kebijakan. Mengingat pentingnya menyelamatkan ekosistem lahan basah di Desa Sungai Buluh dari ancaman limbah plastik dan domestik,

maka sangat krusial untuk membedah masalah ini menggunakan pisau analisis teori implementasi kebijakan. Peneliti memilih teori George C. Edward III yang menekankan pada aspek Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi untuk menemukan akar penyebab dari kegagalan implementasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA SUNGAI BULUH KECAMATAN LABUAN AMAS UTARA”.

B. Fokus Penelitian

Mengingat luasnya permasalahan dalam pengelolaan sampah, maka peneliti perlu membatasi ruang lingkup penelitian agar lebih terarah dan mendalam. Fokus penelitian ini diarahkan pada Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara, dengan menggunakan empat variabel teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III (dalam Agustino,2020), yakni :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara?
2. Apa Saja Faktor Pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis Apa saja Faktor Pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a) Dari aspek keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengembangkan berbagai teori yang sangat berguna bagi

pengembangan pemahaman, penalaran, dan pengalaman peneliti khususnya dalam bidang Ilmu Administrasi Publik.

- b) Sebagai referensi atau bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji permasalahan serupa mengenai pengelolaan sampah atau kebijakan lingkungan di daerah lahan basah/perairan.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam memperbaiki strategi agar lebih efektif menjangkau wilayah pedesaan.
- b) Bagi Pemerintah Desa Sungai Buluh, Sebagai saran untuk meningkatkan fungsi pembinaan dan pengadaan fasilitas pengelolaan sampah demi menjaga kelestarian lingkungan desa.
- c) Bagi Masyarakat, Sebagai upaya edukasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya demi kesehatan dan keberlangsungan ekosistem sungai
- d) Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara.